



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
DENGAN  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN MUSI RAWAS  
TENTANG  
PELINDUNGAN DAN PEMANFAATAN KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Nomor: HKI.5-HH.05.05-1013

Nomor: 070/ 269 /Balitbang/2021

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Tiga Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (23-09-2021) bertempat di Bali, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Daulat P. Silitonga, S.H., M.Hum. : Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, beralamat di Jalan H. R. Rasuna Said Kav. 8-9 Kuningan Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK I;
2. Dr. Ir. Nanti Kasih, M.T. : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Musi Rawas dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Musi Rawas beralamat di Jl. Pangeran Moh. Amin Komplek Perkantoran Pemkab. Musi Rawas Prov. Sumatera Selatan 31661, selanjutnya disebut PIHAK II.

PIHAK I dan PIHAK II selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Paraf Pihak I: .....

Paraf Pihak II: .....  
1

1. Bahwa PIHAK I adalah suatu unit utama di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Kekayaan Intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Bahwa PIHAK II adalah Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan yang salah satu tugas pokok dan fungsinya sebagai Penyusunan Kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan dan selanjutnya menerima pendeklegasian sebagian urusan pemerintah pusat untuk melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Kekayaan Intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. Bahwa PARA PIHAK menyadari kerja sama ini dimaksudkan untuk mendukung program PIHAK I dalam meningkatkan pemahaman dan membangun kesadaran akan pentingnya pelindungan Kekayaan Intelektual di lingkungan PIHAK II, sehingga karya-karya yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan pendidikan, penelitian, dan/atau pelatihan dari hasil pengabdian masyarakat yang diselenggarakan oleh PIHAK II dapat dilindungi dalam sistem Kekayaan Intelektual dan dapat dimanfaatkan bagi kepentingan PIHAK II.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual dengan ketentuan sebagai berikut:

## Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk membangun kerja sama yang produktif, efektif dan sinergis antara PARA PIHAK di bidang pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual.

## Pasal 2 RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup kerja sama ini mencakup:

- (1) Penyebarluasan informasi, sosialisasi, dan diseminasi di bidang Kekayaan Intelektual.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia di bidang Kekayaan Intelektual.
- (3) Pertukaran data di bidang Kekayaan Intelektual.

Paraf Pihak I: .....  


Paraf Pihak II: .....

- (4) Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK di bidang Kekayaan Intelektual.

**Pasal 3**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK I**

- (1) PIHAK I mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- Menyediakan materi, fasilitator, dan narasumber di bidang Kekayaan Intelektual;
  - Mengembangkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) PIHAK II dengan menyelenggarakan kegiatan antara lain: sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis, dan konsultasi teknis di bidang Kekayaan Intelektual;
  - Menyediakan fasilitasi akses penelusuran dan/atau pemanfaatan informasi kekayaan intelektual; dan
  - Memberikan informasi dan pendampingan proses permohonan pendaftaran Kekayaan Intelektual.
- (2) PIHAK I mempunyai hak sebagai berikut:
- Mendapatkan data dan informasi dari PIHAK II terkait jumlah permohonan Kekayaan Intelektual dari hasil penelitian, pengembangan teknologi dan penerapan ilmu pengetahuan;
  - Mendapatkan informasi mengenai hasil identifikasi teknologi dan komersialisasi hasil penelitian yang berbasis Paten atau kekayaan Intelektual lainnya; dan
  - Mendapatkan laporan kegiatan peningkatan kesadaran mengenai Kekayaan Intelektual di lingkungan PIHAK II untuk masyarakat dan pejabat daerah.

**Pasal 4**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK II**

- (1) PIHAK II mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- Memberikan data dan informasi dari PIHAK II terkait jumlah permohonan Kekayaan Intelektual dari hasil penelitian, pengembangan teknologi dan penerapan ilmu pengetahuan;
  - Memberikan informasi mengenai hasil identifikasi teknologi dan komersialisasi hasil penelitian yang berbasis Paten atau Kekayaan Intelektual lainnya; dan
  - Memberikan laporan kegiatan peningkatan kesadaran mengenai Kekayaan Intelektual di lingkungan PIHAK II untuk masyarakat dan pejabat daerah.

Paraf Pihak I: 

Paraf Pihak II: .....

(2) PIHAK II mempunyai hak sebagai berikut:

- a. Mendapatkan materi, fasilitator, dan narasumber di bidang Kekayaan Intelektual;
- b. Mendapatkan pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM) PIHAK II dengan menyelenggarakan kegiatan antara lain: sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis, dan konsultasi teknis di bidang Kekayaan Intelektual;
- c. Mendapatkan fasilitas akses penelurusan dan/atau pemanfaatan informasi Kekayaan Intelektual; dan
- d. Mendapatkan informasi dan pendampingan proses permohonan pendaftaran Kekayaan Intelektual.

## Pasal 5 PELAKSANAAN

(1) Setiap pelaksanaan atas sebagian atau seluruh ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK akan membuat rencana kerja yang dituangkan dalam rencana anggaran dan belanja masing-masing PIHAK.

(2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK menunjuk Satuan Kerja terkait sesuai tugas dan fungsinya.

## Pasal 6 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 7 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf Pihak I: .....  


Paraf Pihak II: .....

**Pasal 8**  
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) PARA PIHAK akan menunjuk Pejabat yang terkait untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 9**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan dan/atau perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 10**  
**KETENTUAN LAIN**

- (1) Setiap perubahan dan lain-lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut atas dasar kesepakatan PARA PIHAK dalam bentuk adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan PARA PIHAK atau force majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan PARA PIHAK.
- (3) Yang termasuk force majeure antara lain adalah:
  - a. Bencana alam;
  - b. Kebijakan Pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan/atau
  - c. Keamanan yang tidak mengijinkan.

**Pasal 11**  
**KORESPONDENSI**

Segala bentuk surat menyurat atau pemberitahuan yang mengikat PARA PIHAK sebagai akibat dari timbulnya Perjanjian ini, baik yang dilakukan melalui email, pos tercatat atau perusahaan ekspedisi (kurir eksternal) / kurir internal ditujukan ke alamat-alamat tersebut di bawah ini:

Paraf Pihak I: .....  


Paraf Pihak II: .....

**A. Untuk PIHAK I**

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Up. Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual

Alamat : Jalan H. R. Rasuna Said Kav. 8-9 Kuningan, Jakarta Selatan

Telp : (021) 5790-5517

E-mail : tu.ditksp@gmail.com

**B. Untuk PIHAK II**

Badan Pengembangan dan Penelitian Kabupaten Musi Rawas

Alamat : Jl. Pangeran Moh. Amin Komplek Perkantoran Pemkab. Musi  
Rawas Prov. Sumatera Selatan, 31661

Telp : (0733) 4540000

E-mail : Balitbangmura17@gmail.com

**Pasal 12**

**PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing dibubuhi meterai yang cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK, dibubuhi cap instansi, dan masing-masing PIHAK memperoleh 1 (satu) naskah asli Perjanjian Kerja Sama.



Daulat P. Silitonga, S.H., M.Hum.



Dr. Ir. Nanti Kasih, M.T.

Paraf Pihak I: .....

Paraf Pihak II: .....